

Lampiran I

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa banyak orang yang berkecimpung di dalam program penanganan bencana besar (seperti pada saat bencana tsunami Aceh 2004) tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi lain, atau kemampuan yang dimiliki organisasi tersebut. Menurut anda, apakah para staff organisasi kemanusiaan tsb memiliki pemahaman mendalam mengenai *humanitarian aid environment*?
2. Menurut anda, apakah yang menjadi hambatan utama dalam hal koordinasi pada saat penanganan bencana di Indonesia?
3. Sistem informasi manajemen dalam penanganan bencana di Indonesia, jika ada, terlihat saling berdiri sendiri / tidak terintegrasi. Apakah anda setuju? Apakah anda tahu penyebab dari hal tersebut?
4. Saya memiliki keyakinan bahwa manajemen informasi memiliki dampak yang besar terhadap proses koordinasi. Bagaimana anda melihat manajemen informasi dapat berpengaruh terhadap permasalahan koordinasi yang ada di lapangan?
5. Menurut anda, apakah manajemen informasi dapat menjadi katalis dalam hal *relationship building* dan *cooperation* di dalam aktivitas pemberian bantuan kemanusiaan?

LAMPIRAN 2

Transkrip wawancara:

Doni Irawan – Child Protection Officer and Emergency Response Focal Point (UNICEF)

1. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa banyak orang yang berkecimpung di dalam program penanganan bencana besar (seperti pada saat bencana tsunami Aceh 2004) tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi lain, atau kemampuan yang dimiliki organisasi tersebut. Menurut anda, apakah para staff organisasi kemanusiaan tsb memiliki pemahaman mendalam mengenai humanitarian aid environment?

Penanganan aktivitas kemanusiaan memang sebuah kegiatan yang kompleks, apalagi dalam situasi tanggap darurat baik akibat bencana maupun konflik. Kekompleksan aktivitas ini meliputi tahapan assessment, perencanaan, budgeting, eksekusi program, monitoring serta evaluasi dalam situasi tanggap darurat, di mana dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan respons. Akhirnya masing-masing organisasi terkungkung dalam batasan-batasan yang melingkupi organisasi mereka. Batasan ini bisa berupa: batas tenggat penggunaan dana, batasan ketersediaan bahan/jenis bantuan, sumberdaya manusia, peralatan, anggaran dan lain sebagainya, demi kecepatan dan ketepatan pemberian response. Hal ini menyebabkan tidak munculnya koordinasi di antara berbagai lembaga yang melakukan kegiatan tanggap darurat. Koordinasi sering dianggap memperlambat response serta membatasi ruang gerak organisasi dalam memberikan response. Sehingga dalam aktivitas respons yang dilakukan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Masing-masing organisasi kukuh pada data-data yang mereka miliki ketika melakukan assessment, di mana dalam melakukan assessment pun

terjadi kecenderungan “hanya sekedar memastikan” bantuan yang dimiliki memang benar dapat didistribusikan ke masyarakat sasaran. Akibatnya ada banyak sekali data untuk sebuah populasi. Di mana data tersebut saling tumpang tindih akibat berbagai assessment yang dilakukan. Tidak ada “clearing house” yang memastikan data yang ada valid. Karenanya sering terjadi duplikasi pemberian bantuan di sebuah lokasi sementara di lokasi yang lain kekurangan bantuan.

Keengganan untuk berkoordinasi juga mengakibatkan masing-masing organisasi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan oleh organisasi yang lain, masing-masing merasa melakukan hal yang benar (sesuai dengan visi-misi tiap organisasi tentunya), sehingga akhirnya masyarakat kembali menjadi korban dari bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan.

2. Menurut anda, apakah yang menjadi hambatan utama dalam hal koordinasi pada saat penanganan bencana di Indonesia?

Ada dua hambatan utama dalam koordinasi yaitu: kejelasan sistem/protokol koordinasi (menyangkut siapa yang mempunyai mandat dan wewenang melakukan koordinasi, siapa yang terlibat, rantai komando serta model pengambilan keputusan) kedua: manajemen informasi. Manajemen informasi dalam bencana lebih dari sekedar bertukar data, tetapi juga memastikan data yang ada valid serta mudah untuk mendapatkan data tersebut. Jika protokol koordinasi sudah jelas dan dijalankan serta manajemen informasi juga berjalan, maka respons terhadap situasi tanggap darurat dapat lebih tepat waktu, tepat bentuk bantuan dan tepat sasaran. Manajemen informasi ini meliputi: pengumpulan dan/pengelolaan data, validasi data, analisis data dan distribusi data. Manajemen informasi ini akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki data, sebuah clearing house (lembaga yang berwenang mem-validasi data) serta pihak-pihak pengguna data.

3. Sistem informasi manajemen dalam penanganan bencana di Indonesia, jika ada, terlihat saling berdiri sendiri / tidak terintegrasi. Apakah anda setuju? Apakah anda tahu penyebab dari hal tersebut?

Ya, memang saat ini masih terlihat manajemen informasi cenderung berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga mempunyai unit-unit dan anggaran untuk melakukan respons dimana pertanggungjawaban respons tersebut hanya tertuju pada pimpinan lembaga yang bersangkutan. Akibatnya informasi hanya mengalir di dalam lembaga tersebut (sifatnya hanya vertical). Lembaga Bakornas/Satkorlak/Satlak bersifat ad-hoc, sehingga informasipun tidak bisa berjalan linear karena pihak-pihak terkait jarang melakukan komunikasi kecuali dalam situasi tanggap darurat.

4. Saya memiliki keyakinan bahwa manajemen informasi memiliki dampak yang besar terhadap proses koordinasi. Bagaimana anda melihat manajemen informasi dapat berpengaruh terhadap permasalahan koordinasi yang ada di lapangan?

Dengan manajemen informasi yang baik tentu saja pelaksanaan respons akan berjalan dengan lebih baik: bantuan akan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat bentuk bantuannya. Tidak akan ada lagi tumpang tindih data ataupun ketidak tepatan distribusi bantuan.

5. Menurut anda, apakah manajemen informasi dapat menjadi katalis dalam hal *relationship building* dan *cooperation* di dalam aktivitas pemberian bantuan kemanusiaan

Ya, dengan adanya manajemen informasi yang bersifat open-loop (semua bisa terlibat tetapi tetap ada lembaga clearing house), akan memunculkan kepercayaan pada setiap organisasi kemanusiaan. Manajemen informasi

Universitas Indonesia

yang baik juga akan mempengaruhi kredibilitas lembaga pemberi bantuan kepada donor mereka. Donor tidak akan menuntut jika akhirnya ada perubahan-perubahan skema bantuan karena situasi lapangan yang tergambar dalam penyajian informasi yang baik melalui manajemen informasi ini. Kemungkinan-kemungkinan kerjasama juga akan menjadi lebih jelas serta mendapat justifikasi untuk dilakukan karena dukungan validitas serta analisi data yang dibuat.

Fadhil Yusri – Deputy Livelihood Program Manager (Canadian Red Cross)

1. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa banyak orang yang berkecimpung di dalam program penanganan bencana besar (seperti pada saat bencana tsunami Aceh 2004) tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi lain, atau kemampuan yang dimiliki organisasi tersebut. Menurut anda, apakah para staff organisasi kemanusiaan tsb memiliki pemahaman mendalam mengenai *humanitarian aid environment*?

Pada umumnya, organisasi-organisasi besar memiliki staff-staff yang memahami secara mendalam humanitarian aid environment, karena organisasi-organisasi tersebut memiliki pengalaman menangani bencana di masa dan tempat yang berbeda sebelumnya. Langkah awal yang umum dilakukan oleh setiap lembaga humanitarian setiba dilokasi bencana s.d sedikitnya 3 bulan setelahnya adalah mengamankan aset dan property (termasuk staff lokal untuk bekerja di lembaga tersebut yang mungkin tidak memiliki pengalaman dalam hal ini sehingga membutuhkan waktu dalam pelatihannya) untuk menjalankan program untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang selamat dari bencana bersamaan dengan mencari informasi untuk menjalankan program yang lebih baik.

2. Menurut anda, apakah yang menjadi hambatan utama dalam hal koordinasi pada saat penanganan bencana di Indonesia?

Ketidaktahuan apa yang dilakukan dan/atau kemampuan respons organisasi lain untuk menangani bencana (paling buruk di awal masa bencana dan semakin membaik sejalan dengan waktu) karena tidak adanya titik kordinasi yang jelas, dimana informasi akurat yang bisa dipercaya bisa didapat (populasi penduduk terakhir, peta lokasi terkena bencana dll), di mana informasi yang diberikan bisa terekam dengan baik dari satu pihak untuk disampaikan kemudian dengan utuh ke pihak lain, ketidak jelasan mengenai tanggung jawab siapa yang menjaga titik koordinasi tersebut dan tidak jelasnya jalur informasi resmi untuk mengumumkan hal-hal terkait dengan penanganan bencana.

3. Sistem informasi manajemen dalam penanganan bencana di Indonesia, jika ada, terlihat saling berdiri sendiri / tidak terintegrasi. Apakah anda setuju? Apakah anda tahu penyebab dari hal tersebut?

Ketentuan mengenai pengaturan penanganan bencana sudah ada sejak tahun 2001 dengan dikeluarkannya Keppres RI No. 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana; menyatakan kedudukan Bakornas BP sebagai badan koordinasi penanggulangan bencana. Setiap departmen dibawah Bakornas memiliki struktur sendiri yang awalnya diharapkan mencukupi untuk merespon bencana dimana masing-masing mungkin memiliki cara sendiri dalam penyimpanan / pengurutan data, definisi-definisi terkait bencana, rekaman mengenai populasi penduduk dan terutama kapan data terakhir diambil. Salah satu faktor penghambat dalam menghadapai bencana menghadapai tsunami tahun 2004 di Aceh adalah lumpuhnya sumber informasi terdepan di Aceh dimana kantor-kantor tempat data disimpan dan staf yang bekerja juga terkena dampak yang cukup berat.

Hal ini tidaklah harus terjadi jika seluruh informasi yang seragam pengambilan dan definisinya mengenai populasi, daerah terdampak tsunami dll yang teraktual tersimpan di satu tempat yang aman sehingga dengan mudah bisa dikeluarkan dan dibagikan kepada pihak yang memerlukan data.

4. Saya memiliki keyakinan bahwa manajemen informasi memiliki dampak yang besar terhadap proses koordinasi. Bagaimana anda melihat manajemen informasi dapat berpengaruh terhadap permasalahan koordinasi yang ada di lapangan?

Manajemen informasi jelas memiliki dampak besar dalam proses koordinasi dimana dengan informasi yang baik dan seragam definisinya akan memudahkan memberikan pengertian yang mendalam dalam pemberian bantuan terhadap daerah terkena dampak dimana dalam informasi tersebut termasuk pelaporan masuknya lembaga melalui 1 jalur dibawah 1 departemen yang ditunjuk sehingga memudahkan mengetahui kemampuan suatu lembaga untuk merespon kebencanaan.

Yang harus diperhatikan juga mengenai informasi adalah bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, disimpan, diaktualkan dan disebarakan sehingga hambatan informasi pada jawaban poin 3 dapat dihindari.

5. Menurut anda, apakah manajemen informasi dapat menjadi katalis dalam hal *relationship building* dan *cooperation* di dalam aktivitas pemberian bantuan kemanusiaan

Jelas dapat, karena implementasi sistem informasi terpadu akan menjadi sarana pertukaran informasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aktivitas pemberian bantuan kemanusiaan, serta akan membantu terbangunnya hubungan yang baik dalam merespon kegiatan bantuan

Universitas Indonesia

kemanusiaan dikemudian hari. Penggunaan standar dan definisi standar seperti SPHERE Standard yang dibangun oleh lembaga-lembaga internasional adalah salah satu langkah yang bijak.

Branco Kalesaran – National Program Representative (Oxfam Indonesia)

1. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa banyak orang yang berkecimpung di dalam program penanganan bencana besar (seperti pada saat bencana tsunami Aceh 2004) tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi lain, atau kemampuan yang dimiliki organisasi tersebut. Menurut anda, apakah para staff organisasi kemanusiaan tsb memiliki pemahaman mendalam mengenai *humanitarian aid environment*?

Penanggulangan bencana yang melibatkan pihak lain di luar pemerintah merupakan hal baru di Indonesia. Tuntutan yang sangat besar akan sumber daya manusia, tidak dapat dipenuhi oleh keterbatasan supply yang tersedia. Supply yang diharapkan dapat dipenuhi oleh sektor profit tidak serta merta didapat, karena konotasi pekerjaan penanggulangan bencana atau kemanusiaan masih lekat dengan konotasi pekerjaan sosial yang tidak diminati.

2. Menurut anda, apakah yang menjadi hambatan utama dalam hal koordinasi pada saat penanganan bencana di Indonesia?

Terdapat 2 sistem koordinasi yang berbeda, antara Bakornas PBP dan Departemen Sosial. Bakornas dibentuk dengan maksud menyatukan semua jalur koordinasi ke dalam satu atap di bawah lembaga ini, yang dipimpin langsung oleh Wapres. tetapi dalam pelaksanaannya, secara de facto, kekuasaan dan sumber dana masih terpusat di Depsos dan juga Kementerian Koordinasi Kesra. Masalah lain timbul pada saat dibentuk badan lain seperti BRR di Aceh dan Nias. Dengan sumber dana yang lebih

Universitas Indonesia

besar dari kedua badan tersebut di atas, masalah kesimpang siuran koordinasi semakin parah.

3. Sistem informasi manajemen dalam penanganan bencana di Indonesia, jika ada, terlihat saling berdiri sendiri / tidak terintegrasi. Apakah anda setuju? Apakah anda tahu penyebab dari hal tersebut?

Ya. harus ada lembaga tunggal yang mengendalikan. Hal ini biasanya disebabkan oleh beragamnya tujuan dan background dari berbagai macam organisasi yang terlibat dalam penanganan bencana.

4. Saya memiliki keyakinan bahwa manajemen informasi memiliki dampak yang besar terhadap proses koordinasi. Bagaimana anda melihat manajemen informasi dapat berpengaruh terhadap permasalahan koordinasi yang ada di lapangan?

Penanganan di lapangan sangat bergantung kepada kualitas informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang tidak berkualitas akan menyulitkan proses identifikasi masalah, pengaturan strategi penanggulangan dan pembagian sumber daya.

5. Menurut anda, apakah manajemen informasi dapat menjadi katalis dalam hal *relationship building* dan *cooperation* di dalam aktivitas pemberian bantuan kemanusiaan?

Ya. Manajemen informasi yang baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas yang dapat dijadikan materi awal pembangunan kerjasama antar pihak.

Pudji Rahardjo – Kepala Bagian Umum BNPB

1. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa banyak orang yang berkecimpung di dalam program penanganan bencana besar (seperti pada saat bencana tsunami Aceh 2004) tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi lain, atau kemampuan yang dimiliki organisasi tersebut. Menurut anda, apakah para staff organisasi kemanusiaan tsb memiliki pemahaman mendalam mengenai *humanitarian aid environment*?

Penyebab utama dari hal tersebut adalah proses koordinasi dan sharing informasi yang kurang berjalan dengan baik, hal ini antara lain disebabkan karena skala dari bencana yang terjadi sangat besar sehingga mengundang sangat banyak pihak untuk turut serta memberikan bantuan di lapangan, serta infrastruktur yang dimiliki oleh Bakornas belum memadai.

2. Menurut anda, apakah yang menjadi hambatan utama dalam hal koordinasi pada saat penanganan bencana di Indonesia?

Masalah kejelasan komando, ego sektor yang tinggi, suasana yang chaotic, landasan hukum belum jelas, tidak adanya keterpaduan informasi (satu sumber), serta tiap organisasi yang terlibat memiliki agenda masing-masing sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja langsung dilapangan tanpa berkoordinasi atau bekerjasama dengan organisasi lain.

3. Sistem informasi manajemen dalam penanganan bencana di Indonesia, jika ada, terlihat saling berdiri sendiri / tidak terintegrasi. Apakah anda setuju? Apakah anda tahu penyebab dari hal tersebut?

Ya. Karena kebutuhan informasi dan kebijakan dari tiap organisasi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan sistem informasi yang ada

Universitas Indonesia

dilapangan memiliki berbagai standar yang berbeda dan sebagian dari sistem tersebut tidak bias saling berkomunikasi.

4. Saya memiliki keyakinan bahwa manajemen informasi memiliki dampak yang besar terhadap proses koordinasi. Bagaimana anda melihat manajemen informasi dapat berpengaruh terhadap permasalahan koordinasi yang ada di lapangan?

Jika berfungsi dengan baik sistem informasi akan sangat membantu para decision maker dalam mengambil kebijakan, sehingga hasil dari keputusan yang diambil akan lebih efektif dan tepat sasaran. Saat ini BNPB sedang mengembangkan sistem informasi terpadu yang pada tahap awal bertujuan menghubungkan seluruh BPBD atau Satkorlak/Satlak di lapangan. Sistem yang sedang dikembangkan ini, tahap awalnya diharapkan sudah dapat beroperasi penuh di akhir tahun 2009.

5. Menurut anda, apakah manajemen informasi dapat menjadi katalis dalam hal *relationship building* dan *cooperation* di dalam aktivitas pemberian bantuan kemanusiaan?

Ya. Jika sistem informasi yang dibutuhkan tersedia, maka proses information sharing dapat dilakukan, yang pada akhirnya akan memupuk relationship building serta proses kerja sama di masa yang akan datang.

Arif Rachman – Project Officer Election Project UNDP

1. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa banyak orang yang berkecimpung di dalam program penanganan bencana besar (seperti pada saat bencana tsunami Aceh 2004) tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi lain, atau kemampuan yang dimiliki organisasi tersebut.

Menurut anda, apakah para staff organisasi kemanusiaan tsb memiliki pemahaman mendalam mengenai *humanitarian aid environment*?

Menurut saya hal tersebut bukan terletak pada kurangnya pemahaman staff mengenai humanitarian aid environment tapi terletak pada tidak tersedianya informasi pada instansi yang berwenang mengatur organisasi-organisasi ini. Hal ini menyebabkan UN selalu bertindak aktif melalui UNOCHA untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh para lembaga UN lainnya dan NGO sebagai partner untuk membantu pemerintah lokal. Sayangnya memang ada saja lembaga yang tidak rutin datang untuk berkoordinasi atau mungkin lembaga-lembaga tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan itu biasanya didireksi dari pusat sehingga kadang lembaga tersebut mengalami kesulitan dalam menyesuaikan keadaan di lapangan.

2. Menurut anda, apakah yang menjadi hambatan utama dalam hal koordinasi pada saat penanganan bencana di Indonesia?

Tidak tersedianya informasi dasar yang mencukupi mengenai bencana yang terjadi (korban jiwa, tingkat kerusakan, dll) dan terlalu banyak instansi pemerintah yang tidak saling berkaitan tapi memiliki tugas dan fungsi yang hampir mirip dalam penanganan bencana, sehingga jalur penanganan menjadi tidak jelas dan simpang siur.

3. Sistem informasi manajemen dalam penanganan bencana di Indonesia, jika ada, terlihat saling berdiri sendiri / tidak terintegrasi. Apakah anda setuju? Apakah anda tahu penyebab dari hal tersebut?

System informasi yang ada mungkin sudah dimiliki oleh sebagian besar organisasi, tetapi karena dibuat oleh lembaga yang berbeda-beda sehingga terlihat tidak terintegrasi. Walaupun demikian biasanya ada

satu atau dua lembaga yang mencoba menyatukan system informasi yang ada.

4. Saya memiliki keyakinan bahwa manajemen informasi memiliki dampak yang besar terhadap proses koordinasi. Bagaimana anda melihat manajemen informasi dapat berpengaruh terhadap permasalahan koordinasi yang ada di lapangan?

Setuju. Sistem informasi yang baik akan membantu dalam efisiensi dan efektivitas kegiatan. Dengan adanya sistem informasi yang baik setiap lembaga seharusnya dapat melakukan perencanaan dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (beneficiaries). Adanya system informasi ini juga akan mencegah tumpang tindih kegiatan atau kegiatan yang berulang.

5. Menurut anda, apakah manajemen informasi dapat menjadi katalis dalam hal *relationship building* dan *cooperation* di dalam aktivitas pemberian bantuan kemanusiaan?

Ya. Manajemen informasi akan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kerjasama organisasi humanitarian.